

DAFTAR PUSTAKA

- BPPKAD Kabupaten Magelang. (n.d.). *Sistem Informasi Bank Data Online*. Sibata.magelangkab.go.id. Diakses tanggal 31 Mei 2021, dari <https://sibata.magelangkab.go.id/>
- BPPKAD Kabupaten Magelang. (n.d.). *Tagihan PBB-P2 - E-PBB-SISMIOP*.E-PBB-SISMIOP. Diakses pada 29 April 2022 , dari <https://epbb.magelangkab.go.id/tagihanpbb>
- Budianta, A. (n.d.). *Direktorat Jendral Kekayaan Negara* . Diakses tanggal 18 Juli 2020, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta:Prenada Media Grup.
- Febriani, Y., & Kusmuriyanto, K. (2015). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. *Accounting Analysis Journal*, 4(4).
- Husnia, F. N., Hidayat, K., & Dewantara, R. Y. (2016). Analisis Penerapan Elektronik Pajak Bumi Dan Bangunan (E-Pbb)(Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 9(1).
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
- Judisseno, R. (1997). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kabupaten Magelang. *Sekilas BPPKAD Kab. Magelang*. (n.d.). Diakses tanggal 29 April 2022, dari <https://bppkad.magelangkab.go.id/home/detail/sekilas-bppkad-kab.-magelang/79>
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Peraturan Bupati Magelang Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019

- Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Putra, B. D. A., Pascarani, N. N. D., & Supriyanti, N. W. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) di Dinas Pendapatan Kota Denpasar Tahun 2015. *Citizen Charter*, 1(1), 165266.
- Rahayu, P. (2019). *Perpajakan Disesuaikan dengan Peraturan Perpajakan Terbaru*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus. Buku 1 Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat
- Ritonga, P., Pratami, G., & Anggreani, T. (2021, August). Pengaruh Penerapan E-PBB dan E-BPHTB Terhadap Penerimaan PAD di Masa Covid-19 Di Badan Pendapatan Daerah Kab Langkat. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, pp. 868-877).
- Siahaan, Marihot Pahala (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Widiastuti, R., & Laksito, H. (2014). Faktor–Faktor Yang memengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan (P-2)(Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 985-999.

Wijayanti, P. F., Nuraina, E., & Astuti, E. (2021). Analisis Penerapan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (E-PBB-P2). *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 11(2), 233-240.